

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tolak ukur penting guna mengevaluasi seberapa sukses pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya adalah pembangunan ekonomi daerah. Kapasitas sebuah wilayah untuk menciptakan lapangan kerja serta memaksimalkan penyerapan tenaga kerja merupakan komponen penting dari pertumbuhan. Indonesia, negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia, mau tidak mau menghadapi masalah yang berkaitan dengan lapangan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang cepat, yang melampaui jumlah lowongan pekerjaan, merupakan masalah ketenagakerjaan yang umum terjadi di Indonesia (Asmara et al., 2024)

Pembangunan ketenagakerjaan sangat penting bagi negara-negara di dunia karena memainkan peran utama dalam mencapai kemajuan nasional. Perlindungan tenaga kerja akan mendapat manfaat dari perkembangan di sektor pekerjaan. Dengan 278 juta penduduk pada tahun 2023, Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia. Ini menunjukkan bahwa, seperti yang diantisipasi untuk kesuksesan Indonesia pada tahun 2045 sebagai Indonesia Emas, potensi lapangan kerja negara akan lebih maju jika dibangun secara sinergis antara berbagai industri (Ainun *et al.*, 2023)

Sejumlah faktor, termasuk modal asing, perlindungan iklim investasi, pasar global, perilaku birokrasi, dan "tekanan" kenaikan upah, berdampak pada isu-isu ketenagakerjaan di Indonesia (Majalah Nakertrans, 2004). Tenaga kerja juga sangat

dipengaruhi oleh otonomi daerah, yang seringkali memiliki dampak negatif. Lapangan kerja juga sangat dipengaruhi oleh kemiskinan, ketidaksetaraan pendapatan, ekspansi ekonomi, urbanisasi, dan stabilitas politik (Sholeh, 2007). Tujuan pembangunan nasional salah satunya yakni meningkatkan kinerja ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja dan memastikan setiap orang memiliki kehidupan yang layak. Tujuan utama misi pembangunan salah satunya yakni mengurangi pengangguran guna menciptakan Indonesia yang sejahtera. Dengan mengetahui seberapa besar penurunan pengangguran, kita juga dapat melihat seberapa besar pembangunan telah meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, yang merupakan salah satu tujuan pembangunan (Sokian & Amir, 2020). Penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting karena menunjukkan seberapa jauh perekonomian mampu menyerap angkatan kerja yang tersedia. Peningkatan lapangan kerja seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dari segi ekonomi, peningkatan lapangan kerja mendorong penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan pendapatan nasional yang lebih tinggi. Di sisi lain, penurunan penyerapan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, merugikan daya saing, dan membatasi prospek ekonomi (Dirgantara & Santoso, 2024). Selain itu, kualitas dan produktivitas tenaga kerja dipengaruhi tingkat pendidikan mereka. Tingkat pendidikan seseorang akan memengaruhi seberapa produktif mereka di tempat kerja. Pendidikan menawarkan sumber daya yang diperlukan guna meningkatkan produktivitas dalam posisi yang memenuhi persyaratan pemberi kerja. Pekerja yang berpendidikan lebih tinggi akan dibayar lebih tinggi dalam jangka pendek. Pendidikan merupakan prasyarat untuk bekerja. Kapasitas seseorang untuk bekerja meningkat seiring dengan tingkat pendidikannya

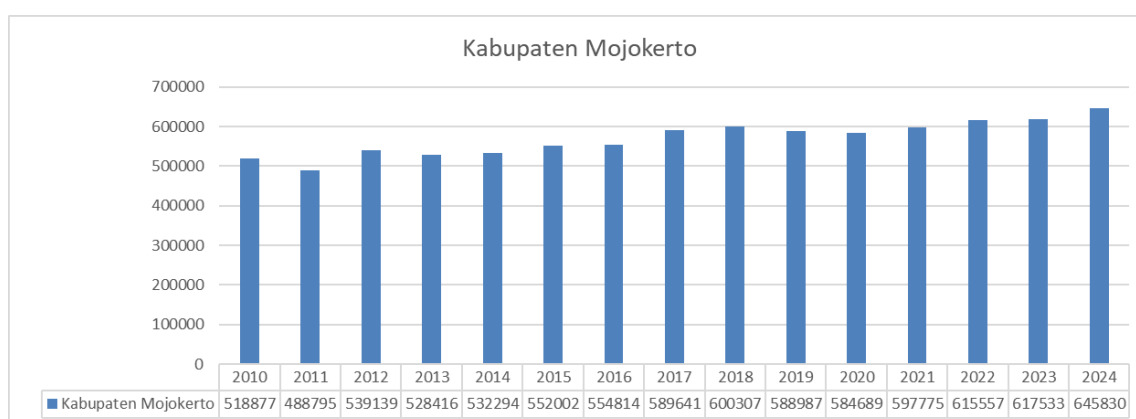
karena mereka memiliki lebih banyak pengetahuan dan kemampuan (Kusumanegara, 2022) Oleh Karena Itu, Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja menjadi isu penting dalam menganalisis dinamika ketenagakerjaan di Indonesia.

Secara regional, salah satu provinsi di Indonesia yang berkontribusi ekonomi terbesar yakni Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur memiliki jumlah penduduk besar, struktur ekonomi beragam, serta kawasan industri yang intensif tenaga kerja. Provinsi Jawa Timur juga menjadi salah satu provinsi terbesar serta terpenting secara ekonomi di Indonesia, dengan kontribusi sektor industri dan jasa yang besar terhadap PDRB regional. Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian di Indonesia yang memiliki rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak terlalu tinggi jikalau dibandingkan dengan pulau lain. Selain itu Pulau Jawa juga memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi jika dibandingkan dengan pulau lain. (Erfani Damayanti, 2024) Seharusnya dengan kondisi demikian membuat Pulau Jawa mampu memaksimalkan penyerapan tenaga kerjanya. Namun, faktanya penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa belum maksimal yang ditandai dengan tingginya angka pengangguran di Pulau tersebut

Ketenagakerjaan di Jawa Timur menunjukkan variasi antar kabupaten atau kota dan beberapa wilayah menonjolkan sektor industri padat modal, sementara yang lain masih didominasi pertanian dan usaha mikro. Selain menjadi komponen penting pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara, tenaga kerja dapat menyebabkan sejumlah masalah, seperti tingginya angka pengangguran, pertumbuhan angkatan kerja yang berlebihan, kualitas tenaga kerja yang buruk,

kemiskinan, dan sebagainya. Jika prospek pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja potensial, tingkat pengangguran akan meningkat, yang menyebabkan peningkatan kemiskinan, kejahatan, dan fenomena sosial ekonomi lainnya di masyarakat (Rusniati & Agustin, 2021)

Gambar 1. 1 Penyerapan Tenaga Kerja



Sumber : Data BPS, 2024

Pembangunan ekonomi daerah merupakan komponen penting pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan suatu wilayah guna menciptakan lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja yakni indikator penting untuk mengevaluasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Pada konteks ini, tenaga kerja memegang peranan strategis sebagai faktor produksi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan perkembangan tahunannya, pada tahun 2010 518.877 dan 2015 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 552.002 jiwa.

Pada tahun 2016, terjadi penurunan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto turun. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas

ekonomi di beberapa sektor, khususnya sektor industri dan pertanian, serta kemungkinan meningkatnya jumlah penduduk yang melanjutkan pendidikan atau keluar dari pasar kerja sementara waktu.

Memasuki tahun 2017, jumlah angkatan kerja kembali meningkat. Kabupaten Mojokerto naik menjadi 589.641 jiwa. Kenaikan ini menunjukkan mulai pulihnya kegiatan ekonomi daerah serta meningkatnya partisipasi penduduk usia kerja seiring dengan berkembangnya sektor industri, perdagangan, dan jasa. Pada tahun 2018, angkatan kerja Mojokerto meningkat menjadi. Tahun 2019 menunjukkan penurunan tipis di Mojokerto. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya perlambatan ekonomi menjelang masa pandemi serta perubahan struktur tenaga kerja di beberapa sektor usaha. Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja Mojokerto sedikit mengalami penurunan, Kondisi ini sangat dipengaruhi dampak pandemi Covid-19 namun di Mojokerto terjadi penyesuaian sektor kerja baru yang tetap menyerap tenaga kerja. Tahun 2021 menunjukkan pemulihan di Mojokerto. Angkatan kerja Mojokerto naik meningkat. Kenaikan ini menunjukkan mulai membaiknya kondisi perekonomian pascapandemi serta dibukanya kembali aktivitas produksi dan perdagangan.

Pada tahun 2022, Kabupaten Mojokerto kembali mengalami peningkatan, menunjukkan mulai stabilnya pemulihan ekonomi di beberapa bidang usaha. Tahun 2023 menjadi titik lonjakan yang signifikan. Mojokerto melonjak tajam Lonjakan ini menunjukkan adanya kebangkitan ekonomi daerah yang cukup kuat, meningkatnya investasi, serta bertambahnya aktivitas usaha baru yang mendorong masyarakat kembali masuk ke pasar kerja. Pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja kabupaten mojokerto mencapai titik tertinggi selama periode pengamatan.

Kabupaten Mojokerto meningkat. Kenaikan ini mencerminkan semakin besarnya jumlah penduduk usia produktif, meningkatnya partisipasi kerja, serta semakin terbukanya kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi.

Secara keseluruhan, fluktuasi angkatan kerja yang terjadi dari tahun 2010 hingga 2024 menunjukkan bahwa dinamika pasar tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, kebijakan pembangunan, situasi pandemi, serta perubahan struktur ekonomi masyarakat. Peningkatan jumlah angkatan kerja mencerminkan peluang besar bagi pembangunan daerah, namun juga menjadi tantangan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. (BPS, 2024)

Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya bertujuan meningkatkan perekonomian, tetapi juga kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan kesempatan kerja yang memadai. Karena peningkatan penyerapan tenaga kerja mengarah pada peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi, penyerapan tenaga kerja merupakan indikator kunci kinerja ekonomi suatu wilayah. Pemilihan Kabupaten Mojokerto selaku lokasi penelitian yang didasarkan pada pertimbangan yang memperlihatkan wilayah tersebut memiliki karakteristik ekonomi dan ketenagakerjaan yang saling melengkapi.

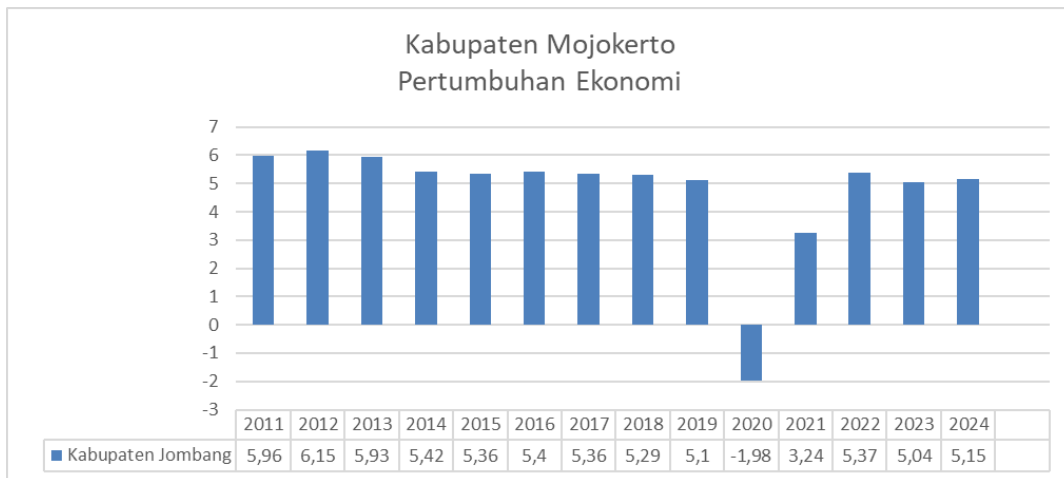
Kabupaten Mojokerto dianggap sebagai salah satu pusat pengembangan industri di Jawa Timur, dengan sektor manufaktur memberikan kontribusi yang substansial terhadap PDB daerah tersebut. Kecurigaan terhadap pertumbuhan tanpa lapangan kerja, sebuah fenomena yang menyiratkan bahwa ekspansi ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan lapangan kerja yang signifikan, telah muncul akibat struktur ekonomi yang padat modal ini. Kondisi ini menjadikan Mojokerto relevan

untuk dianalisis dalam konteks hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan upah minimum, dan dinamika pasar kerja.

Salah satu indikator yang dikenakan guna mengevaluasi kinerja ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan pendapatan total di sebuah wilayah, yang merupakan peningkatan nilai tambah total, dikenal pertumbuhan ekonomi. Pendapatan regional, yang pada dasarnya mencerminkan kemakmuran wilayah tersebut, mencerminkan imbalan atas jasa dari faktor-faktor produksi (tanah, modal, tenaga kerja, serta teknologi) yang aktif di wilayah tersebut (Kusumanegara, 2022). Pertumbuhan ekonomi diyakini akan berdampak pada angkatan kerja, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di sebuah wilayah juga menghasilkan peningkatan produksi ekonomi. Bisnis akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja untuk memenuhi peningkatan produksi ini. Kemiskinan akan meningkat sebagai akibat dari ekspansi ekonomi tanpa adanya lebih banyak peluang kerja.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu aspek yang dapat menghasilkan lebih banyak peluang kerja. Tingkat produksi terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari peningkatan output, makin banyak barang ataupun jasa yang diproduksi, semakin besar pula pertumbuhan ekonominya. Kapasitas ekonomi untuk menawarkan peluang kerja berkualitas tinggi yang dapat memberikan harapan serta optimisme kepada angkatan kerja yang terserap serta dipekerjakan di sektor tersebut adalah isu angkatan kerja yang sebenarnya, bukan hanya jumlah pekerja yang dapat diserap (Rusniati & Agustin, 2021)

Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : Data BPS, 2024

Dari Data (BPS., 2024) Grafik tersebut menampilkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto, selama periode 2010-2024. Secara umum, wilayah Mojokerto memperlihatkan pola yang fluktuatif, yaitu pertumbuhan positif pada tahun-tahun normal dan penurunan tajam pada tahun 2020 sebab dampak pandemi COVID-19, selanjutnya kembali meningkat setelahnya.

Pada Kabupaten Mojokerto, pertumbuhan ekonomi bergerak stabil pada kisaran 5-6 persen selama 2010-2019. Hal ini mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang kuat, khususnya di sektor industri manufaktur yang menjadi basis perekonomian Mojokerto. Namun tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Mojokerto mengalami kontraksi cukup dalam sejumlah $-1,11$ persen, sejalan dengan dampak pandemi yang menyebabkan terhentinya kegiatan industri, jasa, dan perdagangan. Setelah itu, Mojokerto mengalami pemulihan dengan pertumbuhan 3,56 persen pada 2021, meningkat menjadi 5,52 persen pada 2022, dan kembali mencapai level

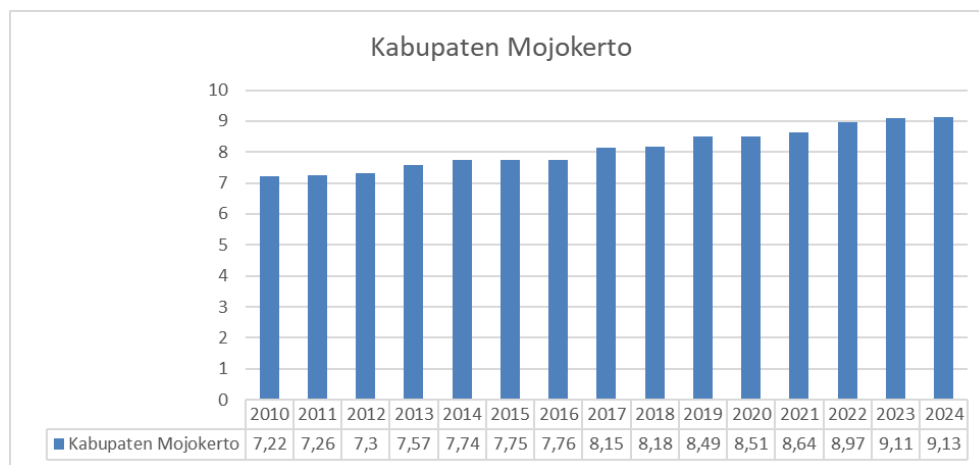
yang lebih stabil di atas 5 persen pada 2023-2024. Ini menandakan pemulihan ekonomi yang kuat dan pulihnya sektor industri sebagai penyumbang utama PDRB.

Secara keseluruhan, Kabupaten Mojokerto cenderung mengikuti pola pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, baik saat terjadi kontraksi pada 2020 maupun dalam fase pemulihan setelahnya. Mojokerto pulih lebih cepat karena didukung aktivitas industri yang lebih besar.

Secara umum, grafik ini memperlihatkan perekonomian daerah tidak hanya dipengaruhi dinamika lokal, tetapi juga kondisi ekonomi nasional dan global. Periode kontraksi pada 2020 dan pemulihan pada 2021-2024 menggambarkan bagaimana wilayah Mojokerto merespon krisis dan kembali bangkit. Data ini penting untuk menjelaskan latar belakang penelitian, terutama ketika membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat, dan dinamika sektor-sektor strategis di wilayah studi.

Para pemberi kerja biasanya mendasarkan keputusan perekrutan pada kualitas personel mereka. Tingkat pendidikan seseorang dapat digunakan untuk mengukur kualitas tenaga kerja mereka. Produktivitas tinggi di tempat kerja dianggap difasilitasi oleh pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tinggi akan mempermudah orang untuk mendapatkan pekerjaan.

Gambar 1. 3 Rata rata Lama Sekolah



Sumber : Data BPS, 2024

Dari data (Statistik, 2024) Grafik tersebut menunjukkan perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Mojokerto, serta Provinsi Jawa Timur selama periode 2010-2024. Ketiga wilayah mengalami tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yang menggambarkan semakin membaiknya akses pendidikan beserta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal.

Pada Kabupaten Mojokerto, RLS meningkat dari sekitar 7.57 tahun 2010, 7,75 di tahun 2015 menjadi 9,11 di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penduduk Mojokerto rata-rata telah mengenyam pendidikan hingga level SMP akhir atau hampir menyelesaikan jenjang SMA. Kenaikan yang stabil setiap tahun mencerminkan peningkatan fasilitas pendidikan, perbaikan kualitas sekolah, serta bertambahnya program pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan wajib

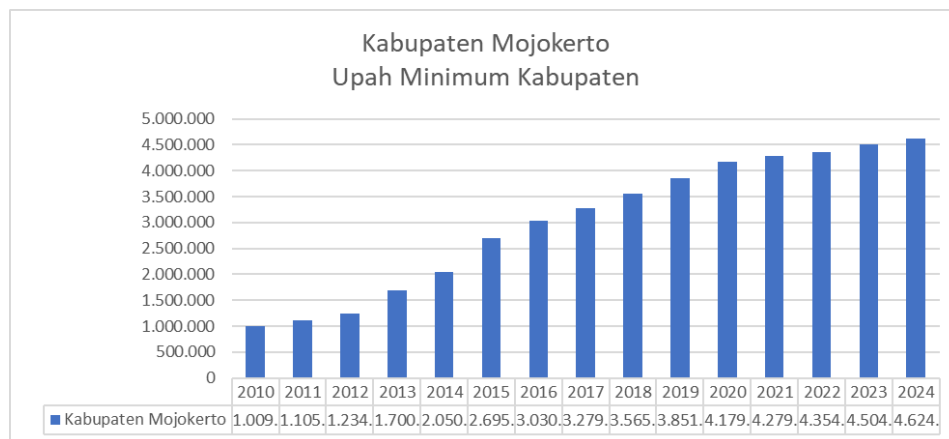
Jika secara keseluruhan, Kabupaten Mojokerto mempunyai rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi serta rata-rata Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi Mojokerto yang cenderung lebih kuat dan didukung keberadaan sektor industri yang mendorong kebutuhan tenaga kerja berpendidikan lebih tinggi.

Secara keseluruhan, peningkatan RLS pada ketiga wilayah menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Jawa Timur terus mengalami kemajuan. Kualitas tenaga kerja dan peluang orang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik jelas dipengaruhi oleh rata-rata masa pendidikan yang lebih lama. Oleh sebab itu, data ini menjadi penting dalam menjelaskan hubungan antara pendidikan, kualitas angkatan kerja, dan dinamika pasar kerja yang sedang diteliti dalam skripsi ini.

Tingkat upah adalah salah satu variabel yang dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja (Erfani Damayanti, 2024) Menurut BPS, upah minimum yakni jumlah terendah yang akan dibayarkan suatu perusahaan kepada pekerjanya. Setiap daerah mempunyai upah minimum yang berbeda untuk para pekerja. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas peraturan upah, sesuai Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum. Dalam usaha guna memenuhi hak pekerja dan buruh atas kehidupan yang layak, pemerintah federal menetapkan upah minimum. Latar belakang studi ini didasarkan pada temuan penelitian empiris yang memperlihatkan peraturan upah minimum tidak sejalan dengan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Upah minimum mempersulit bisnis untuk mempekerjakan pekerja. Harga tenaga kerja telah meningkat di atas harga keseimbangan karena kekakuan harga di pasar tenaga kerja yang disebabkan oleh UMP. Karena keadaan ini, terjadi kelebihan penawaran daripada permintaan, yang

menyebabkan pengangguran. Masalah lain yang disebabkan oleh UMP adalah penurunan penyerapan tenaga kerja karena ketidaksesuaian antara angkatan kerja dan prospek pekerjaan (Candra *et al.*, 2024)

Gambar 1. 4 Tingkat Upah Kabupaten



Sumber : Data BPS, 2024

Dari data (bps., 2024) Grafik menunjukkan perkembangan tingkat upah dari tahun 2010 hingga 2024 untuk Kabupaten Mojokerto, Secara umum, wilayah Mojokerto mengalami tren kenaikan upah setiap tahun, meskipun besarnya tidak sama.

1. Perkembangan Upah dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Pekerja

Kabupaten Mojokerto selalu menempati posisi sebagai wilayah dengan tingkat upah tertinggi dibandingkan Kabupaten Jombang maupun rata-rata provinsi. Dimulai dari 2010 sekitar 1.009.000 sekitar Rp 2,695 juta pada tahun 2015 dan meningkat stabil hingga mencapai kurang lebih Rp 4,624 juta pada tahun 2024. Kenaikan yang konsisten ini menunjukkan bahwa Mojokerto memiliki kapasitas ekonomi yang kuat, terutama karena aktivitas industri manufaktur yang cukup besar.

Kenaikan upah yang cukup signifikan setiap tahun ini dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja, terutama terkait pemenuhan kebutuhan hidup dasar. Tingkat upah yang tinggi juga menggambarkan adanya pertumbuhan sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja lebih terampil, sehingga upah pun lebih kompetitif.

Penyerapan tenaga kerja merupakan metrik penting untuk mengevaluasi seberapa baik perkembangan ekonomi suatu wilayah. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa berbagai faktor ekonomi dan sosial, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat gaji, dan pencapaian pendidikan, berdampak pada laju penyerapan tenaga kerja. Pada investigasinya (Rahmatin, 2023) Upah berdampak negatif pada penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten, tetapi pertumbuhan ekonomi serta pendidikan mempunyai dampak yang menguntungkan dan cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas organisasi untuk menyerap tenaga kerja mungkin terhambat oleh kenaikan upah yang tidak sebanding dengan produktivitas.

Hasil serupa juga ditunjukkan oleh (Dinar Aulia Rahman, 2022) yang meneliti Provinsi Jawa Timur menggunakan metode regresi panel. Studi ini menemukan jika walaupun upah minimum berdampak negatif pada lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan bisa meningkatkan lapangan kerja. Hasil ini mendukung gagasan bahwa undang-undang upah minimum harus selaras dengan kondisi ekonomi lokal untuk mencegah kekurangan tenaga kerja (Sulfina, 2021) yang meneliti wilayah Sumatera Utara juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi serta tingkat pendidikan berdampak positif signifikan kepada penyerapan tenaga kerja, sementara upah minimum berpengaruh negatif. Hal ini menunjukkan

bagaimana faktor-faktor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan secara konsisten memengaruhi perluasan kesempatan kerja di berbagai lokasi.

Namun, hasil yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh (Mubin Faridloh et al., 2020) di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menemukan pertumbuhan ekonomi serta kualitas penduduk berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja, sementara upah tidak berdampak signifikan. Temuan ini mengindikasikan jika faktor kualitas SDM memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan pasar kerja menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, (Widia & Samsuddin, 2025) dalam penelitiannya di Provinsi Jawa Barat menyimpulkan jika pertumbuhan ekonomi serta kualitas pendidikan secara bersama-sama berdampak positif serta signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Perihal ini berarti pembangunan ekonomi yang disertai peningkatan kualitas pendidikan akan terciptanya lapangan kerja yang lebih luas.

Penelitian oleh (Kusumanegara, 2022) di Provinsi Bali memperlihatkan jika pertumbuhan ekonomi serta pendidikan berdampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja, sementara upah minimum tidak berdampak signifikan. Hasil ini memperlihatkan jika peran upah minimum pada penyerapan tenaga kerja masih bervariasi antar daerah. Sementara itu, (Syahrani dan Djohan, 2020) gunakan analisis jalur untuk menyelidiki hubungan antara lapangan kerja, upah minimum, serta pertumbuhan ekonomi. Temuan memperlihatkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan lapangan kerja melalui upah minimum, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Terakhir, (Rusniati & Agustin, 2021) yang meneliti Kabupaten Malang menemukan pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja, sementara upah minimum berdampak negatif. Perihal ini kembali

menegaskan adanya potensi trade-off antara kebijakan upah minimum serta penyerapan tenaga kerja.

Bersumber pada berbagai hasil penelitian tersebut, dikatakan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan secara konsisten berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara itu pengaruh upah minimum masih menunjukkan hasil yang beragam, bahkan cenderung negatif di beberapa daerah. Oleh sebab itu, penelitian lebih lanjut diperlukan guna mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, serta upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya pada wilayah dan periode yang berbeda, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan beberapa kesenjangan penelitian (research gap) yang dijadikan dasar dilaksanakannya penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menganalisis satu wilayah atau menggunakan data agregat provinsi, sehingga belum mampu menggambarkan perbedaan karakteristik antar kabupaten secara lebih spesifik. Kedua, penelitian pengaruh dampak upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja terus menghasilkan hasil yang saling bertolakbelakang dengan beberapa studi menunjukkan dampak positif dan studi lainnya menemukan dampak negatif. Ketiga, belum banyak penelitian yang menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, serta upah minimum secara simultan dengan pendekatan komparatif antar wilayah dalam satu periode pengamatan yang sama.

Kebaruan dari penelitian ini berada pada pendekatan yang digunakan, yaitu untuk mengetahui factor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto yang memiliki karakteristik ekonomi dan ketenagakerjaan

yang relative berkembang, penelitian ini mengombinasikan tiga variabel utama pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, serta upah minimum dalam satu model analisis untuk melihat pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja secara lebih komprehensif. Penelitian ini pula menggunakan data terbaru serta fokus pada level kabupaten, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih relevan bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan daerah

wilayah dengan struktur ekonomi ini memberikan nilai penting. Dengan menganalisis wilayah Mojokerto, penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja bersifat konsisten di berbagai tingkat perekonomian daerah atau justru menunjukkan variasi. Untuk mengetahui juga sejauh mana kebijakan upah berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, upah minimum sektoral di tingkat provinsi harus setidaknya lima persen lebih tinggi dari upah minimum standar provinsi, berdasarkan Peraturan Menteri. Demikian pula, upah minimum sektoral di tingkat kabupaten atau kota harus lima persen lebih tinggi dari upah minimum standar kabupaten atau kota (Rusniati & Agustin, 2021)

Dengan demikian, Masalah tenaga kerja merupakan masalah yang sangat penting serta rumit. Kekhawatiran tentang hubungan industrial antara pekerja dan sektor bisnis, serta kondisi kerja yang baik, output berkualitas tinggi, kompensasi yang adil, serta kaliber SDM, sering muncul dalam diskusi ketenagakerjaan. Dapat dikatakan bahwa masih terdapat sejumlah disparitas struktural dan sektoral dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Akibatnya, peningkatan utilitas angkatan kerja adalah salah satu tujuan yang harus diupayakan. Supaya kebijakan yang diterapkan

mendekati tujuan yang dimaksud, secara teoritis perlu mempertimbangkan penawaran tenaga kerja, yang dipengaruhi waktu luang pekerja individu, permintaan tenaga kerja, yang dipengaruhi nilai produk marjinal (*Value of Marginal Product, VMP*), dan upah. Pemilihan kedua kabupaten tersebut bukan cuma didasarkan pada ketersediaan data yang lengkap serta reliabel dari Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi juga karena keduanya menawarkan konteks ekonomi yang kontras dan relevan untuk menguji hipotesis penelitian. Perpaduan antara wilayah industri Mojokerto. Kabupaten Mojokerto mempunyai karakteristik ekonomi berbeda, namun menunjukkan dinamika ketenagakerjaan yang berbeda dan membuat penulis ingin meneliti terkait penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Mojokerto?
2. Apakah Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto?
3. Apakah Upah Minimum Berpengaruh Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk Menganalisis Bagaimana Upah Minimum Berpengaruh Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Mojokerto.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yakni Kabupaten Mojokerto, dimana mengenakan variabel dependen (terikat) yakni Penyerapan Tenaga Kerja serta variabel independen (bebas) yakni Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, serta Upah minimum. Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif mengenakan data time series. Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, serta Upah minimum di Kabupaten Mojokerto selama 15 tahun digunakan di penelitian ini. Penelitian ini mendapatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto pada tahun 2010-2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari temuan penelitian ini, yakni:

1. Bagi akademisi, temuan ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait subjek yang sama.

2. Bagi pemerintah dapat mempertimbangkan temuan ini ketika mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
3. Bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto, temuan ini diharapkan dapat membantu penduduk untuk lebih memahami bagaimana penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pencapaian pendidikan, dan upah minimum.
4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan temuan ini dapat berfungsi sebagai panduan dan referensi untuk studi di masa mendatang.